



## Analisis Kebijakan Standar Mutu Kualitas Sarana dan Prasarana antar Wilayah

Wahida Purnama<sup>1\*</sup>, Ahyar<sup>1</sup>, Badrun<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram, Indonesia.

DOI: <https://doi.org/10.29303/goescienceed.v7i3.2026>

### Article Info:

Received : 10 Mei 2026  
Revised : 15 Mei 2026  
Accepted : 26 Mei 2026  
Published : 05 Juni 2026

### Correspondence:

Wahida Purnama

Phone:

**Abstract:** Educational facilities and infrastructure constitute one of the main pillars in achieving the improvement of national education quality. This study aims to analyze the Policy of Quality Standards for Facilities and Infrastructure Across Regions, as well as to identify various supporting and inhibiting factors in its implementation. Using a qualitative approach through document study and educational policy analysis methods, this case study compares the conditions at MTsN 1 Lombok Barat and MTsN 4 Lombok Barat. The results of the study indicate a gap in facilities and infrastructure across regions. MTsN 1 Lombok Barat, as a flagship madrasah, has relatively met the standards with complete and representative facilities. On the other hand, MTsN 4 Lombok Barat, as a developing madrasah, faces significant limitations in terms of laboratories, libraries, sports fields, and the utilization of educational technology. The main inhibiting factors include a lack of facilities and infrastructure, financial constraints, and suboptimal management. As a solution, the policy of "Strengthening Facilities and Infrastructure Management Based on Collaboration and Optimization of Local Resources" was selected, which is realistic, participatory, and in line with the spirit of School-Based Management (SBM).

**Keywords:** Policy Analysis; Quality Standards; Educational Facilities; Infrastructure Equity in Education.

**Citation:** Purnama, W., Ahyar, & Badrun. (2026). Analisis Kebijakan Standar Mutu Kualitas Sarana dan Prasarana antar Wilayah. *Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi, Dan Geofisika (GeoScienceEd Journal)*, 7(3), 2094–2101. <https://doi.org/10.29303/goescienceed.v7i3.2026>

## Pendahuluan

Meningkatkan kualitas kehidupan manusia, maka pendidikan memiliki peran yang paling penting, di mana kualitas sumber daya manusia akan terlihat meningkat manakala memiliki ilmu pengetahuan, bahkan keterampilan. Di sinilah, pendidikan adalah investasi besar bagi masyarakat dan bangsa di manapun. Hal senada juga ditulis oleh Kunandar sebagai berikut.

Pendidikan adalah investasi sumber daya manusia jangka panjang yang mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia di dunia. Oleh karena itu, hampir semua warga negara menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan utama dalam konteks pembangunan bangsa dan negara. Begitu juga Indonesia menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan utama. Hal itu dapat

dilihat dari isi pembukaan UUD 1945 Alinea IV menegaskan bahwa salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. (Kunandar, 2011)

Merealisasikan pesan Undang-Undang di atas, maka pendidikan atau yang disebut sekolah memiliki peran utama dalam menentukan berhasil atau tidaknya cita-cita tujuan pendidikan tersebut. Sekolah dituntut untuk memiliki kemandirian untuk mengatur dan mengurus kepentingan sekolah menurut kebutuhan dan kemampuan sendiri serta berdasarkan pada aspirasi warga sekolah dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku.

Hal ini terutama ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan, khususnya pada pendidikan dasar. Untuk

Email: [wahidapurnama6@gmail.com](mailto:wahidapurnama6@gmail.com).

mewujudkan dan mengatur hal tersebut, maka melalui "Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional dijelaskan tentang prinsip utama standar minimal yang harus dimiliki atau diadakan oleh lembaga pendidikan, terutama pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah." (Indonesia, 2011)

Adapun Standar minimal sarana prasarana pendidikan secara nasional dituangkan pada Bab IV Pasal 42 disebutkan bahwa:

1. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
2. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi bahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang lain yang diperlukan untuk menunjang pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang di atas maka Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 mengatur secara teknis tentang standar sarana dan prasarana pada unit Sekolah Menengah Pertama (SMP). Djemari Murdapi, seperti ditulis oleh Kunandar menyebutkan, bahwa "pendidikan memiliki peran utama dalam pengembangan personal dan sosial, perubahan individu, perdamaian, kebangsaan, kebebasan dan keadilan. Kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang dinamis, karena selalu disesuaikan dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi moderen". Berbagai upaya telah banyak dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan pendidikan nasional, seperti pemantapan pelaksanaan kurikulum, peningkatan jumlah, jenis dan mutu sarana dan prasarana pendidikan.

Menurut Barnawi, bahwa prasarana pendidikan adalah "semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Oleh karena itu sarana dan prasarana pendidikan adalah satu kesatuan pendukung terlaksanakannya proses belajar dan mengajar dengan baik dan optimal." (Barnawi&Arifin, 2012) Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung yang sangat penting dalam dunia pendidikan selain tenaga pendidik. Pendidikan tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana tidak akan dapat

terpenuhi tanpa adanya manajemen yang dijalankan dalam lembaga pendidikan yang terkait dan dengan adanya manajemen sarana dan prasarana pendidikan akan berdaya untuk proses pembelajaran serta mengupayakan tercapainya mutu pendidikan.

Agar semua upaya peningkatan mutu pendidikan bisa tercapai maka kegiatan-kegiatan menuju tercapainya tujuan tersebut perlu ditinjau oleh layanan manajemen atau pengelolaan yang teratur dan memadai. Demikian juga peningkatan jumlah, jenis serta kualitas sarana dan prasarana pendidikan harus ditunjang oleh perangkat pelayan, yaitu hasil guru, tepat guna, dan daya guna. Jika sarana dan prasarana sudah memenuhi ketiga aspek kegunaan maka diharapkan kualitas pendidikan dapat diwujudkan sesuai dengan baik.

Sekolah merupakan lembaga publik yang mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan kepada publik, khususnya pelayanan untuk peserta didik yang menuntut pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar agar manusia mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. Pendidikan merupakan ujung tombak bagi kemajuan bangsa. Jika pendidikan suatu bangsa baik maka baik pulalah generasi penerusnya. Sementara itu, baik atau tidaknya pendidikan di suatu bangsa dapat dilihat dari pelaksanaan serta orientasi sistem pendidikan tersebut. Semakin jelas pendidikan itu, maka semakin tampak pula perkembangan dan kemajuan suatu bangsa.

## Metode

Metode analisis kebijakan ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi dokumen dan analisis kebijakan pendidikan. (Sugiyono 2019) Metode ini digunakan untuk memahami kebijakan yang telah dirumuskan serta bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dalam praktik di tingkat madrasah. Data yang digunakan dalam analisis ini bersumber dari dokumen kebijakan pendidikan, program kerja madrasah, serta literatur ilmiah yang relevan dengan topik Analisis Kebijakan Standar Mutu Kualitas Sarana Dan Prasarana Antar Wilayah.

Penelitian ini konteks MTSN 4 & MTSN 1 Lombok Barat, reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Proses reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, menyederhanakan, dan memfokuskan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi yang berkaitan dengan: (1) analisis kebijakan standar mutu kualitas sarana dan prasarana antar wilayah di MTsN 1 dan MTsN 4 Lombok Barat; (2) faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan; serta (3) persepsi warga madrasah terhadap

kondisi tersebut. Selanjutnya, data disajikan (*data display*) dalam bentuk narasi deskriptif dan pengelompokan tema—seperti kondisi riil sarana prasarana, efektivitas kebijakan standar mutu, serta peran guru dan siswa—sehingga memudahkan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) mengenai kondisi nyata di lapangan.

## Hasil dan Diskusi

### Implementasi Kebijakan Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Sekolah

Secara etimologis, kata implementasi jika dirujuk dari kamus Webster, yakni to implement (mengimplementasikan) berarti melaksanakan sesuatu). Begitu juga implementasi kebijakan merupakan tahapan bersifat praktis berbeda dengan formulasi rumusan masalah atau perumusan kebijakan sebagai tahap yang bersifat teoritis. (Arwildayanto, et al. 2018)

Kegiatan pendidikan juga harus memenuhi standar nasional pendidikan yang dijelaskan dalam peraturan pemerintah no. 19 tahun 2005. Ruang lingkup standar nasional pendidikan di jelaskan dalam pasal 2 ayat 1 yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Sarana dan prasarana pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kegiatan pendidikan, dalam setiap kegiatan dibutuhkan alat yang dapat membantu kelancaran dalam kegiatan pendidikan. Tujuan pendidikan akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh peralatan yang cukup memadai, sehingga tujuan itu dapat dicapai dengan baik. Oleh karena itu pemerintah telah menyusun standar sarana dan prasarana pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 42 yang berbunyi:

(1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

(2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat olahraga, tempat beribadah, tempat rekreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. (SNP, 2005)

Dalam kaitannya dengan implementasi sarana dan prasarana, ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen penting harus dipenuhi dalam menunjang sistem pendidikan.

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat diartikan sebagai segenap proses pengadaan dan pendaagunaan komponen secara langsung maupun tidak langsung menunjang proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

Sebagai pelaksana tugas pendidikan, guru juga mempunyai andil dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Dalam hal ini guru lebih banyak berhubungan dengan sarana pengajaran, yaitu alat pengajaran, alat peraga dan media pengajaran lainnya dibandingkan dengan keterlibatannya dengan prasarana pendidikan yang tidak langsung berhubungan.

Guru harus dapat memanfaatkan segala sarana dan prasarana seoptimal mungkin dan bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan pemakaian sarana dan prasarana yang ada. Juga bertanggung jawab terhadap penempatan sarana dan prasarana tersebut di kelas dimana dia mengajar. Demikian juga dalam perawatan sarana dan prasarana secara sederhana yang tidak harus membutuhkan keahlian profesional, dapat dilakukan oleh guru. (Soetjipto dan Rafli Kosasi, 1999).

Keberadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah tidak langsung begitu saja. Sarana dan prasarana ada tentunya juga melalui beberapa proses yang panjang dan rumit. Dalam meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana juga melalui beberapa proses yang tidak mudah, diantaranya meliputi: Perencanaan, Pengadaan, Pengalokasian, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Perawatan, Inventarisasi dan Penghapusan. Perencanaan pengadaan harus dirancang dengan benar sebelum pengadaan dilakukan. Bila rencana dari awal sudah matang maka sangat berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh setelah pengadaan. Perencanaan dilakukan setelah meneliti kembali perlengkapan yang dibutuhkan. Pengadaan terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang terlaksananya kegiatan belajar mengajar sudah selazimnya dalam proses pengadaan benar-benar memperhatikan terhadap kebutuhan paling pokok dalam menunjang keberhasilan kegiatan belajar mengajar.

### Faktor Penghambat

Berdasarkan wawancara dengan guru, kepala sekolah dan peserta didik MTsN 4 & MTsN 1 Lombok Barat, peneliti menemukan beberapa faktor penghambat dalam meningkatkan mutu Pendidikan di MTsN 4 & MTsN 1 Lombok Barat sebagai berikut.

### Kurangnya Sarana Prasarana

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk masa depan masyarakat dan bangsa.

Namun, di balik tekad untuk meningkatkan mutu pendidikan, kita harus menghadapi beberapa kendala serius yang berkaitan dengan sarana dan prasarana. Kurangnya investasi dan perhatian terhadap aspek ini dapat menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam pencapaian tujuan pendidikan yang berkualitas. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah terdapat beberapa fasilitas olahraga yang terbatas, dan laboratorium yang minim dapat merugikan pengalaman belajar siswa.

Fasilitas yang terbatas ini tidak hanya menghambat kegiatan pembelajaran, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kurang kondusif untuk perkembangan akademis dan kreativitas siswa. Infrastruktur pendidikan yang buruk, seperti bangunan yang rusak atau tidak terawat, dapat menjadi penghambat serius terhadap keamanan dan kenyamanan siswa serta guru. Kondisi bangunan yang tidak memadai dapat mengganggu proses pembelajaran dan menciptakan lingkungan yang tidak mendukung perkembangan potensi siswa. Keterbatasan teknologi

pendidikan menjadi penghambat serius. Di era di mana teknologi terus berkembang, akses terbatas terhadap perangkat, koneksi internet, dan juga perangkat lunak pembelajaran dapat membatasi peluang siswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang terkini dan mendalam. Integrasi teknologi yang efektif dalam pembelajaran tidak hanya memerlukan investasi dalam perangkat keras, tetapi juga dukungan pelatihan bagi guru untuk mengoptimalkan pemanfaatannya di MTsN 4 & MTsN 1, belum menggunakan media yang bersifat teknologi dalam melakukan pembelajaran sehari-hari, mereka masih menggunakan cara konvensional dengan metode ceramah dan disukusi. Selain itu juga terdapat kurangnya ketersediaan bahan ajar yang terbatas.

Pendidikan yang optimal. Guru yang memiliki keterbatasan dalam bahan ajar cenderung menghadapi kesulitan dalam memberikan pengajaran yang inovatif dan relevan. Keterlibatan yang rendah dari sumber daya pembelajaran yang beragam dapat merugikan perkembangan intelektual siswa.

**Tabel 1.** Sarana dan Prasarana MTsN 4 dan MTsN 1 Lombok Barat

Aspek	MTsN 1 Lombok Barat	MTsN 4 Lombok Barat
Status & Lokasi	Madrasah model/ unggul, terakreditasi A (Unggul). Lokasi di area yang lebih mapan	Madrasah yang lebih baru/berkembang, berlokasi di Gerung (Jl. Imam Bonjol, Gerung Utara).
Ruang Kelas	Ruang kelas representative dan ber-AC	Ruang kelas standar, dilakukan pengecekan dan pemeliharaan rutin oleh kanwil kemenag.
Laboratorium	Laboratorium IPA, computer, dan bagasa yang memadai.	Masih terbatas dan masih di kembangkan
Perpustakaan	Perpustakaan dengan koleksi buku beragam	Masih terbatas dan masih di kembangkan
Lapangan Olahraga	Lapangan olahraga serbaguna ( futsal, voli, basket )	Fasilitas belum memadai
Fasilitas Ibadah	Masjid/ musholla yang nyaman	Musholla/ ruang ibadah masih standar
Fasilitas Lain	Klinik kesehatan (UKS), kantin sehat, WIFI area, lingkungan hijau dan tertata rapi	Ruang tata usaha, ruang guru, sedang pembangunan akses jalan masuk baru
Kondisi Sarpras	Fasilitas lengkap dan representative sebagai madrasah unggulan	Sedang ditingkatkan ( kunjungan kanwil kemenag focus cek dan perbaikan sarpras, termasuk meja kursi dan bangunan )
Prestasi Pendukung	Prestasi tinggi di berbagai bidang (pramuka, olahraga, akademik) mendukung lingkungan belajar baik.	Prestasi di bidang akademik ( olimpiade matematika) dan karate, focus pengembangan sarpras

**Kurangnya Sumber Daya Finansial**

Salah satu dampak paling langsung dari kurangnya sumber daya finansial adalah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Fasilitas fisik yang memadai, seperti ruang kelas yang nyaman dan laboratorium yang lengkap, seringkali menjadi

barang mewah bagi lembaga pendidikan yang kekurangan dana. Kondisi ini dapat merugikan pengalaman belajar siswa dan menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sarana pendidikan. (Auliaulfattah et al., 2024). Kurangnya sumber daya juga memengaruhi kualitas guru.

Pelatihan dan pengembangan profesional untuk meningkatkan keterampilan pengajaran guru seringkali terhambat karena keterbatasan anggaran. Guru yang kurang didukung finansial mungkin kesulitan mengakses sumber daya pembelajaran yang mutakhir dan juga terkini, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam memberikan pengajaran yang bermutu tinggi. (Auliaulfattah et al., 2024) Pemilihan dan implementasi teknologi pendidikan juga terpengaruh oleh ketersediaan dana. Kebutuhan akan perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur teknologi yang modern memerlukan investasi yang signifikan. Lembaga pendidikan dengan sumber daya terbatas mungkin menghadapi keterbatasan dalam menyediakan akses teknologi yang merata bagi semua siswa. (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024)

Selain itu, kurangnya dana dapat menciptakan hambatan dalam penyediaan bahan ajar dan kurikulum yang mutakhir. Pengadaan buku teks, materi pembelajaran interaktif, dan sumber daya pembelajaran online membutuhkan investasi yang berkelanjutan. Tanpa dukungan finansial yang memadai, pendidikan mungkin gagal mengikuti perkembangan pengetahuan dan juga tuntutan zaman. Dampak kurangnya sumber daya finansial ini juga dapat merembet pada kondisi fisik dan pemeliharaan gedung sekolah. Bangunan yang rusak atau tidak terawat menciptakan lingkungan belajar yang tidak aman dan tidak kondusif. Pemeliharaan yang terabaikan dapat meningkatkan biaya perbaikan jangka panjang dan juga menambah beban keuangan lembaga pendidikan. (Najib & Maunah, 2022)

Berdasarkan wawancara dengan guru, kepala sekolah dan peserta didik MTsN 4 & MTsN 1 Lombok Barat, peneliti menemukan beberapa faktor pendukung dalam meningkatkan mutu Pendidikan di MTsN 4 & MTsN 1 Lombok Barat sebagai berikut.

**Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana yang memadai menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Ruang kelas yang nyaman, laboratorium yang lengkap, perpustakaan yang terorganisir, serta fasilitas olahraga yang baik adalah unsur-unsur kunci yang mendukung

keberhasilan pembelajaran. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sarana dan prasarana menjadi esensial dalam membangun fondasi pendidikan Peningkatan kualitas yang kokoh. sarana dan prasarana pendidikan bukanlah sekadar investasi fisik semata, tetapi juga investasi dalam generasi yang akan datang. Fasilitas pendidikan yang unggul menciptakan lingkungan belajar yang memicu rasa ingin tahu dan semangat belajar siswa. Oleh karena itu, upaya bersama dalam memperbarui dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan menjadi esensial dalam mencapai tujuan mutu pendidikan yang optimal. Hanya dengan memberikan fondasi yang kokoh bagi proses pembelajaran, kita dapat membimbing generasi mendatang menuju kesuksesan dan juga kontribusi positif dalam masyarakat. (Baharuddin et al., 2025)

**Peningkatan Alokasi Anggaran Pendidikan**

Peningkatan Alokasi anggaran pendidikan adalah langkah penting menuju perbaikan mutu pendidikan. Dana yang cukup dan dikelola dengan baik akan menciptakan lingkungan pendidikan yang berdaya saing, merata, dan memberikan peluang yang adil bagi setiap individu untuk mengembangkan potensinya. Dengan memberikan perhatian serius terhadap peningkatan alokasi anggaran pendidikan, kita dapat membuka jalan menuju sistem pendidikan yang lebih baik dan berkualitas.

Untuk mengatasi tantangan ini, perlu dilakukan upaya bersama dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Peningkatan alokasi anggaran pendidikan, peningkatan efisiensi pengelolaan dana, dan pencarian sumber pendanaan alternatif dapat menjadi langkah-langkah strategis. Program kemitraan antara sektor publik dan swasta juga dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menyediakan sumber daya finansial yang lebih besar untuk pendidikan. (Baharuddin et al., 2025) Dengan mengatasi kurangnya sumber daya finansial, kita dapat membuka pintu menuju pendidikan yang lebih merata, inklusif, dan bermutu. Pendidikan yang didukung dengan dana yang memadai adalah investasi jangka panjang yang tidak hanya memberdayakan individu, tetapi juga mendorong kemajuan dan inovasi dalam masyarakat secara keseluruhan.

**Tabel 2.** Implementasi Kebijakan Standar Mutu Pendidikan di MTsN 4 dan MTsN 1 Lombok Barat

Aspek Implementasi	MTsN 1 Lombok Barat (Model/Unggulan)	MTsN 4 Lombok Barat (Berkembang)
Status Akreditasi	Terakreditasi A (Unggul)	Terakreditasi C (sedang dalam proses peningkatan)
Dokumen Perencanaan Mutu	Memiliki Renstra lengkap yang menargetkan pemenuhan 8 SNP, budaya mutu, dan peningkatan akreditasi. Perkin tahunan.	Melaksanakan Perkin 2025 fokus pengembangan sarpras & prestasi (belum ada Renstra publik detail).

Standar Isi & Proses	Kurikulum sesuai KMA 184/2019, penyusunan silabus, workshop KBC & Deep Learning bagi guru (48 guru ikut), supervisi akademik.	Workshop peningkatan kapasitas guru (Deep Learning), RPP inovatif, Halaqoh & IMTAQ rutin. Prestasi olimpiade Matematika.
Standar Pendidik	Peningkatan kompetensi guru (sertifikasi, PPG), supervisi komprehensif.	Workshop guru rutin, kunjungan Kanwil Kemenag untuk pembinaan.
Sarana Prasarana	Memenuhi SPM tinggi (ruang AC, lab, perpustakaan, lapangan). Rehabilitasi dilakukan.	Sedang ditingkatkan (pembangunan akses masuk 2025, pemeliharaan ruang kelas).
Pengelolaan & Penjaminan Mutu	Budaya mutu kuat, evaluasi rutin, refleksi tahunan, pelibatan stakeholder, prestasi tinggi.	Perkin, kunjungan bupati & Kanwil Kemenag, fokus SPMI dasar & prestasi ekstrakurikuler (Karate).
Pembiayaan & Akses	BOS, PIP, bantuan optimal; akses afirmasi.	MBG (Makan Bergizi Gratis), BOS, dukungan daerah.
Prestasi & Output	Prestasi akademik & non-akademik tinggi; lingkungan belajar unggul.	Juara Olimpiade Matematika, prestasi Karate; peningkatan pesat.
Tantangan & Fokus	Pemeliharaan status unggul & inovasi (TIK, deep learning).	Percepatan pembangunan sarpras & peningkatan akreditasi.

### Alternatif Pemecahan Masalah dan Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis kondisi sarana dan prasarana di MTsN 1 dan MTsN 4 Lombok Barat, serta berbagai faktor penghambat yang telah diidentifikasi (kurangnya sarana dan prasarana, keterbatasan anggaran, minimnya pemanfaatan teknologi, serta manajemen yang belum optimal), peneliti mengajukan beberapa alternatif pemecahan masalah sebagai berikut:

### Optimalisasi Pengelolaan Anggaran dan Diversifikasi Sumber Pendanaan

1. Meningkatkan efisiensi penggunaan dana BOS, PIP, dan APBD.
2. Mencari sumber dana alternatif melalui Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, dana zakat, infak, dan waqf produktif dari lembaga filantropi Islam.
3. Mengajukan proposal hibah ke Kementerian Agama, Kanwil Kemenag Provinsi NTB, dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

### Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana secara Bertahap

1. Memenuhi terlebih dahulu Standar Minimal Sarana dan Prasarana sesuai Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 dan Permendiknas No. 24 Tahun 2007.
2. Melakukan renovasi dan pengadaan secara prioritas (laboratorium IPA, perpustakaan, ruang kelas, fasilitas olahraga, dan akses internet).
3. Pengadaan perangkat teknologi pendidikan secara bertahap.

### Penguatan Manajemen Sarana dan Prasarana Berbasis Partisipatif

1. Membentuk Tim Manajemen Sarana dan Prasarana yang melibatkan kepala madrasah, wakil sarana prasarana, guru, dan komite.
2. Melaksanakan inventarisasi aset secara rutin dan digital
3. Menerapkan sistem pemeliharaan preventif (jadwal rutin perawatan) yang melibatkan guru dan siswa.

### Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

1. Pelatihan bagi guru dalam pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi.
2. Kerja sama dengan perguruan tinggi (UIN Mataram) untuk pelatihan dan pendampingan manajemen sarana prasarana.
3. Melibatkan siswa dalam kegiatan kebersihan, perawatan, dan pengelolaan perpustakaan melalui ekstrakurikuler.

### Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pembelajaran

1. Mengembangkan *blended learning* meskipun fasilitas terbatas dengan memanfaatkan platform gratis (Google Classroom, WhatsApp Business, YouTube Edukasi).
2. Membangun laboratorium virtual untuk mata pelajaran IPA.

### Kebijakan yang Diambil

Dari berbagai alternatif di atas, kebijakan yang dipilih sebagai kebijakan utama adalah:

## **Penguatan Manajemen Sarana dan Prasarana Berbasis Kolaborasi dan Optimalisasi Sumber Daya Lokal**

1. Realistis dan dapat langsung dilaksanakan meskipun dalam keterbatasan anggaran pemerintah.
2. Tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan pusat, sehingga lebih mandiri.
3. Melibatkan banyak pihak (partisipatif), sehingga meningkatkan rasa memiliki dan akuntabilitas.
4. Sesuai dengan semangat Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan otonomi madrasah.
5. Mendukung pemerataan mutu pendidikan antar wilayah (antara madrasah unggulan dan madrasah berkembang di Lombok Barat).

### **Langkah-Langkah Kebijakan**

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, berikut adalah langkah-langkah operasional yang dirancang dalam empat tahap:

#### **Tahap Persiapan (1-3 bulan)**

1. Melakukan audit dan pemetaan kondisi sarana prasarana secara menyeluruh.
2. Membentuk Tim Manajemen Sarana dan Prasarana Madrasah.
3. Menyusun Rencana Pengembangan Sarana Prasarana (RPSP) 5 tahunan.
4. Sosialisasi kebijakan kepala seluruh stakeholder madrasah.

#### **Tahap Implementasi (4-12 bulan)**

1. Prioritas pengadaan/renovasi sarana paling mendesak (laboratorium, perpustakaan, toilet, akses internet).
2. Mengajukan proposal dana ke berbagai sumber (Kemenag, CSR, Waqf).
3. Melaksanakan pelatihan guru dan staf tentang pengelolaan dan pemanfaatan sarana-prasarana.
4. Mengembangkan sistem inventaris digital.

#### **Tahap Monitoring dan Evaluasi (berkelanjutan)**

1. Melakukan monitoring bulanan oleh tim internal.
2. Evaluasi semesteran dengan melibatkan komite madrasah dan Dinas/kanwil kemenag.
3. Melaporkan hasil secara transparan kepada stakeholder.

#### **Tahap Pengembangan Jangka Panjang**

1. Membangun laboratorium lengkap dan ruang multimedia.

2. Mengintegrasikan teknologi dalam seluruh proses pembelajaran.
3. Menjadi madrasah percontohan dalam pengelolaan sarana prasarana di wilayah Lombok Barat.

Dengan pelaksanaan langkah-langkah ini secara konsisten dan berkelanjutan, diharapkan kesenjangan sarana dan prasarana antar madrasah dapat dikurangi, sehingga mutu pendidikan di MTsN 1 dan MTsN 4 Lombok Barat menjadi lebih merata dan berkualitas.

### **Kesimpulan**

Standardisasi sarana dan prasarana (sarpras) merupakan pilar utama peningkatan kualitas pendidikan nasional. Analisis ini menunjukkan adanya kesenjangan nyata antara MTsN 1 Lombok Barat (madrasah unggulan dengan sarpras representatif) dan MTsN 4 Lombok Barat (madrasah berkembang dengan keterbatasan laboratorium, perpustakaan, lapangan, dan teknologi). Hambatan utama meliputi keterbatasan finansial dan manajemen sarpras yang belum optimal, yang berdampak pada proses pembelajaran konvensional. Melalui kebijakan "Penguatan Manajemen Sarpras Berbasis Kolaborasi dan Optimalisasi Sumber Daya Lokal" yang selaras dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), kesenjangan ini diharapkan dapat diatasi secara bertahap demi mewujudkan pemerataan mutu pendidikan.

### **Ucapan Terimakasih**

Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada Prof. Dr. Akhyar, M.Pd. dan Dr. H. Badrun, M.Pd. selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Kebijakan Pendidikan yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta ilmu yang berharga dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga penulis tunjukkan kepada pihak sekolah, Kepala Sekolah, dan segenap Guru di MTsN 1 dan MTsN 4 Lombok Barat yang telah bersedia membantu serta meluangkan waktu dalam memberikan data wawancara maupun observasi lapangan. Tidak lupa, penulis mengapresiasi semua pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga artikel ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik.

### **Referensi**

- Barnawi. Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2015.
- Djemari Murdapi. Manajemen Berbasis Sekolah. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Panduan Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan. Jakarta: Kemendikbud, 2020.
- Kunandar. Manajemen Pendidikan. Jakarta: Gaung

- Persada Press, 2013.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press, 1992.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Atas.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Auliaulfattah, F., Afrida, D. N., Qoffayana, E., Ramadianti, F. I., Madura, U. T., & Indah, P. T. (2024). Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Sdi a. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(12).
- Baharuddin, B., Muthi, I., & Haryono, P. (2025). Membangun Lingkungan Belajar yang Kondusif: Evaluasi dan Solusi untuk Perbaikan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Negeri Sukajadi 04 Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(9), 2163-2173. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i9.4613>
- Najib, M. A., & Maunah, B. (2022). Inovasi Pendidikan di Era Digital. In *Manajemen Pendidikan Islam* (Vol. 10, Issue 1). [https://www.google.co.id/books/edition/INOVASI\\_PENDIDIKAN\\_SEKOLAH\\_DASAR\\_DI\\_ERA/lrvIEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Inovasi+Pendidikan%2BKristiawan,+M&pg=PA171&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/INOVASI_PENDIDIKAN_SEKOLAH_DASAR_DI_ERA/lrvIEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Inovasi+Pendidikan%2BKristiawan,+M&pg=PA171&printsec=frontcover)
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). Pendidikan Era Digital Tantangan Bagi Generasi Z (Vol. 2).